



Belum Siap, Jangan Dipaksakan

Laporan Ardhi Wahdan, Riyana Ekawati

KEBIJAKAN lima hari sekolah yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diwarnai pro kontra. Ada yang setuju lima hari sekolah, ada pula yang tetap melaksanakan enam hari sekolah. Mungkin karena masih dalam masa transisi sehingga butuh penyesuaian, reaksi tersebut dinilai wajar.

Kebijakan lima hari sekolah dibuat dengan harapan bisa mendukung percepatan pendidikan karakter bagi peserta didik. Tapi mengingat kondisi sekolah dan SDM guru selaku tenaga pengajar kondisinya cukup beragam, dinas pendidikan tidak pernah memaksa sekolah untuk melaksanakan.

Bahkan untuk pelaksanaan di jenjang SMA/SMK DIY Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) memutuskan belum diberlakukan dalam tahun ajaran 2017/2018. Kebijakan itu diambil karena Disdikpora DIY masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Setelah Perpres tersebut dikeluarkan akan dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan soal lima hari sekolah.

"Memang ada kabupaten/kota yang sudah memberlakukan kebijakan lima hari sekolah bagi jenjang SD dan SMP. Namun karena Perpres yang berkaitan dengan lima hari sekolah belum turun, kami lebih memilih untuk menunggu, sehingga untuk jenjang SMA/SMK belum diberlakukan lima hari sekolah," kata Kepala Disdikpora DIY Drs K Baskara Aji.

Dikatakan, pelaksanaan lima hari sekolah sifatnya bukan paksaan, jadi kalau kondisi sekolah belum siap tidak perlu memaksakan diri. Untuk itu, sambil menunggu kepastian dari pemerintah pusat yang dituangkan dalam bentuk Perpres, pihaknya meminta kepada sekolah untuk memberikan layanan terbaik bagi siswa, sehingga tidak ada alasan karena masih menerapkan enam hari sekolah, kualitas layanan bagi siswa menjadi berkurang.

Di Kota Yogya, program lima hari sekolah digulirkan mulai tahun ajaran 2017/2018. Seluruh sekolah negeri dan sebagian besar sekolah swasta juga langsung memberlakukan anjuran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Meski merupakan kebijakan baru, namun sekolah yang menerapkannya dianggap mampu menyesuaikan diri dengan baik.

"Minggu kemarin Dewan Pendidikan Kota Yogya mengumpulkan kepala sekolah yang dibagi dalam dua gelombang kaitannya dengan penerapan lima hari sekolah. Gelombang pertama bagi seluruh kepala sekolah jenjang SMA/SMK, dan gelombang kedua jenjang SD dan SMP. Hasil dari pertemuan itu dilaporkan ke dinas jika seluruh sekolah tidak memiliki hambatan," papar Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogya, Edy Heri Suasana.

Menurutnya, sejak awal pihaknya meminta sekolah agar tidak memaksakan diri dalam memulai lima hari sekolah, sehingga dalam tahun ajaran baru kali ini ada beberapa sekolah yang tetap menerapkan enam hari sekolah, di antaranya SDN Kotagede 1, SMP Gotong Royong, SD Marsudirini dan lainnya. Hal itu juga tidak dipersoalkan lantaran kebijakan lima hari sekolah harus mempertimbangkan kearifan lokal serta kesiapan sekolah.

Edy memaparkan, penerapan lima hari sekolah memang harus diimbangi dengan beragam kegiatan tambahan. Hal ini lantaran kegiatan di sekolah berlangsung selama delapan jam mulai pukul 07.00 hingga 15.00. Dari sisi kebutuhan siswa, maka harus ada penyiapan makan siang. Bagi sekolah negeri, dilarang mengorganisir kebutuhan makan siang siswa melainkan menjadi beban orangtua atau walimurid.

Berbeda dengan swasta yang sebagian besar mendatangkan pihak catering atas kesepakatan komite sekolah. "Khusus yang negeri ada orangtua yang mengorganisir kebutuhan makan siang di kelas. Tapi pihak sekolah negen tidak diperbolehkan, karena itu diserahkan ke orangtua," jelasnya.

Sisi lainnya menyangkut materi pembelajaran usai pukul 13.00 hingga 15.00. Kondisi siang hari dimungkinkan daya serap siswa terhadap materi pelajaran mulai berkurang. Hal ini menuntut pengelola agar memberikan stimulasi pembelajaran. Terutama dengan memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler maupun penerapan madrasah diniyah. "Justru pada siang hari itu pembelajarannya harus menyenangkan. Bahkan sangat kami dorong jika dimanfaatkan untuk

madrasah diniyah bagi yang muslim," imbuhnya.

Di samping itu, setiap guru dan kepala sekolah juga sudah memahami dengan tidak memberikan tugas rumah kepada siswa di akhir pekan. Hari Sabtu dan Minggu, sepenuhnya harus diperuntukkan bagi pengembangan karakter anak di rumah bersama orangtua, sehingga sekolah tidak dianjurkan memberikan beban kepada anak didik pada waktu tersebut.

Disinggung mengenai keluhan maupun masukan dari orangtua, menurut Edy, sampai saat ini belum ada yang diterimanya. Begitu pula terhadap siswa yang memiliki minat khusus di luar sekolah seperti latihan olahraga maupun kursus di waktu sore hari. Menurutnya hal itu bisa disesuaikan dan dikoordinasikan ke pihak sekolah.

Lima hari sekolah, menurut Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, Dr. Ariswan DEA, pada hakikatnya adalah upaya percepatan dari peningkatan pendidikan karakter peserta didik. Hal itu dikarenakan falsafah pendidikan di Indonesia menganut tiga pusat pendidikan yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat.

"Lewat kebijakan lima hari sekolah sangat diharapkan ketiga pusat pendidikan itu bisa memberikan perannya dengan baik, khususnya dalam menciptakan generasi mendatang yang memiliki karakter Indonesia andal," kata Ariswan.

Menurutnya, lima hari di sekolah atau selama 40 jam perminggu dengan kegiatan akademik dan pendidikan karakter yang dilakukan

oleh komunitas sekolah, diharapkan mampu menumbuhkan etos belajar dan kerja sama baik dari setiap siswa. Tentu semua itu tidak terlepas dari bimbingan guru profesional yang berkarya dengan panggilan jiwanya. Selain itu, kebijakan lima hari sekolah secara implisit menuntut pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan berlangsungnya pendidikan berkualitas.

"Saya lebih melihat banyak positifnya bila kita memang benar-benar melaksanakan dengan berbagai inovasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Seluruh tugas akademik siswa diselesaikan di sekolah, sehingga kalau ada tugas-tugas pada dasarnya adalah tugas pembentukan karakter dalam berinteraksi dengan masyarakat di mana keluarga mereka bertempat tinggal," jelasnya.

Pengamat pendidikan dari UNY tersebut menambahkan, kalau melihat dari sisi keluarga, dua hari dalam satu minggu anak bisa kumpul bersama keluarga. Di sinilah peran keluarga perlu ditingkatkan. Bukankah tanggung jawab utama pendidikan pada anak sebenarnya bukan di sekolah, tapi lebih kepada kedua orangtuanya.

"Kita semua berharap pendidikan keluarga akan lebih mewarnai garis cita-cita bagi anak-anak. Untuk itu, kami berharap bagi pemangku amanah dan seluruh elemen masyarakat bisa menciptakan suasana yang kondusif dalam proses pembelajaran anak-anak," katanya. -o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005